

Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya

Inrehab, “lepra politik” dan “bersih diri”: metafora kesehatan sebagai ingatan pe-liyan-an rezim Orde Baru

Rehabilitation installation, "political leprosy" and "clean self": health metaphors as memories of The New Order regime

Martina Safitry^{a*}, Anna Mariana^b

martina.safitry@staff.uinsaid.ac.id, anna.geulis@gmail.com

^{ab}UIN Raden Mas Said Surakarta, Jl. Pandawa, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo, Indonesia

*Corresponding email: martina.safitry@staff.uinsaid.ac.id

ARTICLE INFO

Received: June 30, 2024
Revised: October 13, 2024
Accepted: December 01, 2024
Published: December 31, 2024

Permalink/DOI

10.17977/um020v18i22024p166-181

Copyright © 2024.
Sejarah dan Budaya
Email: jsb.journal@um.ac.id
Print ISSN: 1979-9993
Online ISSN: 2503-1147

How to Cite APA Style:

Safitry, M., & Mariana, A. (2024). Inrehab, “lepra politik” dan “bersih diri”: Metafora kesehatan sebagai ingatan pe-liyan-an rezim Orde Baru. *Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya*, 18(2), 166-181. <https://doi.org/10.17977/um020v18i22024p166-181>



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) license.

ABSTRACT

Masalah terbesar paska rezim otoriter tumbang adalah tidak adanya rekonsiliasi untuk menegakkan keadilan. Rezim memberikan penanda kuasanya membungkam kelompok kiri. Memori kolektif masyarakat atas peristiwa 1965 yang berbeda-beda saling berkontestasi di masyarakat. Maka, penting membangun (kembali) ingatan masyarakat yang bertitik tolak pada ingatan yang dibungkam. Salah satu situs ingatan yang dibungkam itu adalah pengalaman para korban yang di-liyan-kan melalui metafora kesehatan. Beberapa kosakata yang merupakan metafora kesehatan dikaitkan dengan peristiwa 1965. Ingatan masyarakat terhadap instalasi rehabilitasi Pulau Buru dan Plantungan merupakan ingatan bagaimana orang-orang yang (dianggap) terlibat peristiwa G30S harus “disembuh”kan dari penyakit “ideologi”. “Bersih diri”, “Bersih lingkungan,” adalah mekanisme rezim melakukan pengawasan terhadap masyarakat. Tulisan ini menunjukkan penggunaan istilah medis sebagai metafor dalam kebijakan anti-komunis masa Orde Baru mengakibatkan pemarjinalan dan pe-liyan-an masyarakat. Dengan menggunakan sejarah lisan sebagai perspektif, penelitian ini menunjukkan bagaimana metafora kesehatan sebagai kuasa wacana atas ingatan berlangsung lebih lama daripada keruntuhan rezim yang anti-komunis itu sendiri.

KEYWORDS

metafora kesehatan; per-liyan-an; anti komunis; ingatan; wacana kekuasaan

ABSTRAK

The biggest problem after the authoritarian regime fell was the absence of reconciliation to uphold justice. The regime signaled its power to silence the left. Different collective memories of the events of 1965 are contested in society. Therefore, it is important to (re)build the memory of the community, starting from the silenced memories. One of the sites of silenced memory is the experience of the victims, which is queered through health metaphors. Several vocabulary words that are health metaphors are associated with the events of 1965. People's memories of the Buru Island and Plantungan rehabilitation installations are memories of how people who were (perceived to be) involved in the G30S events had to be "cured" of the disease of "ideology". "bersih diri", "bersih lingkungan," is the regime's mechanism for monitoring society. Using oral history as perspective, this paper shows how the metaphor of health as a discursive power over memory lasted longer than the collapse of the anti-communist regime itself.

KATA-KATA KUNCI

health metaphors; others; anti-communist; memory; power discourse

PENDAHULUAN

Beberapa peristiwa pelanggaran HAM di masa lalu muncul menjadi ingatan kolektif masyarakat¹ dan menjadi wacana perdebatan di ruang-ruang publik pada saat ini. Bahkan pada tahun 2023 lalu, pemerintah memberikan perhatian khusus untuk mengungkap dan mengakui adanya pelanggaran HAM pada masa lalu dan disampaikan sendiri oleh Presiden Joko Widodo (Nugraheny & Rastika, 2023). Hanya saja, upaya pengakuan tentang adanya pelanggaran HAM tersebut tidak dibarengi dengan tindakan nyata, yakni menghukum pelaku pelanggaran HAM di ranah hukum. Bahkan, penegakkan HAM di negeri ini menghadapi tantangan ingatan yang lebih berat pada kabinet rezim Prabowo saat ini karena kementerian HAM justru dipimpin oleh Menteri yang memberikan pernyataan pelanggaran HAM pada masa lalu secara kontroversial (Nandito & Fajri, 2024).

Pelanggaran HAM yang menjadi polemik karena lontaran Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasaryakatan itu adalah peristiwa kerusuhan dan pemerkosaan Mei 1998. Selain peristiwa Mei 1998, pelanggaran HAM di masa lalu yang belum diselesaikan adalah tragedi kemanusiaan paska peristiwa G30S di mana sekitar 500.000 orang yang dituduh komunis dibunuh secara sistematis (Cribb, 2001). Pelanggaran HAM pada kasus 1965 berdimensi tidak hanya hukum namun melibatkan politik stigmatisasi, pertarungan ideologi serta kekerasan budaya yang sistemik. Stigmatisasi bahkan pelarangan ideologi komunis masih tetap dipertahankan. Dimulai pada tanggal 5 Juli 1966, komunisme ditetapkan sebagai ideologi terlarang berdasarkan TAP MPRS No.XXV/MPRS/1966. Sejak saat itu ideologi komunis menjadi momok menakutkan bagi masyarakat, terutama bagi yang terlibat dan berafiliasi dengan organisasi komunis. Padahal unsur-unsur pembentukan Indonesia dalam ranah kebangsaan terbentuk dari beragam unsur kelompok dan ideologi. Sejak masa pergerakan periode tahun 1920an, organisasi-organisasi berbasis pada ideologi yang berbeda-beda seperti Islam, nasionalis dan komunis dapat kita temukan dari perkumpulan-perkumpulan, organisasi hingga pemikiran (Simbolon, 2006; Soekarno, 1964). Namun, setelah tragedi kemanusiaan 30 September, ideologi komunis menjadi ideologi yang terlarang karena Partai Komunis Indonesia (PKI), dianggap sebagai dalang terjadinya G30S oleh negara (Roosa, 2008).

Upaya untuk menempatkan PKI sebagai pihak yang harus bertanggung jawab terhadap peristiwa tersebut berlangsung sangat sistematis. Dimulai dengan pelarangan media massa untuk terbit pada hari-hari pertama paska G30S, penangkapan anggota PKI tanpa proses peradilan, hingga pembunuhan, dalam jumlah besar, terhadap orang-orang yang dituduh sebagai kelompok pendukung PKI. Para anggota PKI serta seluruh “keluarga komunis” lainnya yang berideologi kiri kemudian “diamankan”, serta harus “disembuh”kan. Proses pe-liyan-an² karena ideologi yang dituduh berbahaya, kelompok kiri dianggap

¹ Pengertian ingatan kolektif masyarakat dapat diartikan sebagai ingatan sosial yang berkaitan dengan respon berbagai kalangan atas peristiwa tertentu meskipun setiap orang memiliki ingatan yang berbeda-beda terhadap peristiwa tersebut. Namun, ketika masyarakat membicarakannya dan memperdebatkan hal penting atas ingatan tersebut maka hal itu dapat dikatakan sebagai ingatan sosial (Roosa et al., 2004).

² Pengertian liyan (*others*) disini merupakan bentuk pembedaan dari *the self* (diri sendiri, budaya sendiri, ideologi sendiri). Maka proses me-liyan-kan adalah proses menjauhkan, menstigmatisasi hingga menjelekkan hal diluar *the self*. Dalam bukunya yang berjudul *Orientalisme*, Said menjelaskan definisi *the self* dan *others* dalam kacamata pasca kolonial untuk membaca bahwa peradaban

masyarakat sebagai kelompok yang mengidap penyakit “ideologi yang berbahaya”. Stigma “berpenyakit” tersebut bukan hanya dilekatkan pada tahanan politik akan tetapi juga berlaku untuk anggota keluarganya. Selain itu sebagai mekanisme pengawasan dan kontrol, pemerintah menetapkan peraturan “bersih diri” dan “bersih lingkungan” agar ideologi komunis tidak tumbuh kembali. Penggunaan kosa kata tersebut menunjukkan bahwa ideologi komunis dianggap seperti penyakit menular berbahaya yang harus disembuhkan dan dihentikan penyebarannya. Metafora seperti itu terus menerus diulang dan diingatkan bahkan hingga para tapol dibebaskan.

Fokus utama dari artikel ini adalah melihat bagaimana metafora-metafora kesehatan diproduksi melalui mekanisme “epidemiologi penindasan” (*epidemiology of oppression*) pada masa Orde Baru. Penulis berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: *Pertama*, bagaimana metafora-metafora kesehatan diciptakan dan diproduksi? *Kedua*, bagaimana ingatan masyarakat atas metafora kesehatan? *Ketiga*, bagaimana metafora kesehatan ini membentuk budaya pe-liyan-an sebagai penindasan yang tersebar dalam masyarakat?

METODE

Penulis memilih sejarah lisan sebagai metode dan perspektif, dikarenakan sejarah lisan lebih banyak dikenal sebagai metode sejarah belaka. Sejarah lisan sebagai perspektif dalam penelitian sejarah masih tergolong jarang dilakukan. Sejarah lisan merupakan genre penulisan (Kuntowijoyo et al., 2023), atau metodologi yang fokus pada kaum marjinal seperti rakyat biasa, perempuan hingga kelompok *queer*. Kelompok marjinal ini seringkali tidak ada catatan atau dokumen tertulis mengenai sejarah mereka. Sehingga dengan memilih siapa yang akan diwawancarai dalam sejarah lisan menjadi langkah awal sebagai bagian dari pendemokratisasian sejarah (Thompson, 2012), dan dapat mewujudkan sejarah yang egaliter, munculnya narasi sejarah rakyat biasa, dan bukan hanya sejarahnya orang elite belaka (Kuntowijoyo, 2003).

Selain sejarah lisan, penulis menggunakan pendekatan bahasa untuk melihat bagaimana metafora kesehatan digunakan sebagai kampanye anti-komunis. Kekuasaan atas penggunaan bahasa ini terlihat jelas dalam penggunaan metafora kesehatan untuk mengelabui kenyataan sebenarnya yang dihadapi oleh masyarakat.

PEMBAHASAN

Metafora kesehatan sebagai “epidemiologi” penindasan

Untuk memahami bagaimana Rezim Orde Baru mengukuhkan kekuasaannya, maka penjelasan mengenai adanya dukungan militer sebagai penopang rezim tidaklah cukup. Ada beragam lapis penindasan yang dilakukan rezim terhadap kelompok masyarakat yang

masyarakat Timur seringkali dilyankan oleh Peradaban Barat karena seringkali dilihat dari pandang Barat (baca: Eropa). Pandangan-pandangan mengenai Timur lebih banyak konotasi negatif karena Timur dianggap sebagai liyan bangsa Barat (Said, 2010). Maka, dalam konteks tulisan ini, peliyanan dilihat sebagai cara pandang rezim terhadap yang di luar dirinya, terutama mengenai ideologi. Cara pandang rezim sebagai diri sendiri, melakukan peliyanan kepada masyarakat yang berbeda dengan ideologi Negara. Semua aktivitas masyarakat yang dianggap keluar dari *the self* (dalam konteks Indonesia adalah Pancasila) maka akan dilyankan.

dituduh terlibat G30S ini. Penindasan tersebut tersebar, layaknya penyakit, melalui beragam praktik mulai dari kebijakan, politik, budaya dan sosial.

Penggunaan konsep “epidemiologi penindasan” kami anggap mampu untuk menjelaskan bagaimana praktik produksi metafora-metafora kesehatan masuk ke dalam psikologi masyarakat, alam bawah sadar masyarakat dan dinormalisasi dalam kehidupan sehari-hari (Fanon, 2008). Kerangka memahami epidemiologi penindasan ini ditawarkan dalam tulisan Fanon yang berjudul *Black Skin, White Mask*. Fanon menjelaskan situasi mengenai ketertindasan yang menyebar pada pengalaman orang kulit hitam. Bagi masyarakat kulit hitam, pengalaman kolonialisme dan juga rasisme berkelindan membentuk imajinasi dan sekaligus kerendahdirian identitas orang kulit hitam di hadapan orang kulit putih bahkan sejak ia lahir di alam bawah sadar. Fanon mengkritisi sebagian besar orang kulit hitam tidak pernah menyadari bahwa “definisi” yang diterima mereka adalah sebagai bentuk dari wujud tubuh masyarakat yang terjajah yakni kolonialisme dan rasisme. Fatalnya, menurut Fanon, masyarakat terjajah ini merasa akan “naik kelas” ketika dapat menyamai pencapaian orang kulit putih (Fanon, 2016). Sehingga untuk melihat dan merasakan tentang kepahitan atau kemarahan terhadap rasisme anti kulit hitam, perlu menguak berbagai lapisan penindasan itu secara spesifik yang berlangsung dalam jangka panjang melalui kekerasan struktural dan simbolik, sebagai epidemiologi (Fanon, 2016).

Hal yang sama terjadi pada masyarakat yang mengalami kekerasan struktural yang terwujud melalui lembaga, simbol hingga bahasa seperti penggunaan metafora. Kekerasan sistemik serupa dengan epidemiologi penindasan, dan penindasan-penindasan tersebut tersebar layaknya penyakit di setiap lapis struktur sosial politik dan budaya masyarakat. Dalam kasus ini, masyarakat yang dikategorikan sebagai orang yang disebut berpenyakit “ideologi yang berbahaya”. Bahasa menjadi bentuk penindasan yang nyata, karena dengan bahasa yang digunakan pemerintah, masyarakat dapat tertindas dengan sangat mudah. Kata-kata “diseret ke atas meja hijau,” adalah salah satu contoh penggambaran bagaimana orang yang diambil secara paksa, tanpa adanya asas praduga tak bersalah menjadi tersangka begitu saja. Bahasa yang tersebar berupa bahasa eufemistis pada masa rezim Orde Baru adalah bahasa yang melakukan kuasa atas warga negaranya (Anderson, 2000).

Kekuasaan atas penggunaan bahasa ini terlihat jelas dalam penggunaan metafora kesehatan untuk mengelabui kenyataan sebenarnya yang dihadapi oleh masyarakat. Penggunaan metafora kesehatan ini dapat dilacak juga penggunaannya pada periode kolonial. Jejak penggunaan metafora kesehatan dalam mengukuhkan kekuasaan itu dapat kita telusuri dari pengalaman aktivis pergerakan pada masa kolonial. Hal ini terjadi dalam melakukan penangkapan serta “pemolisian”. Para aktivis pergerakan sudah tidak asing lagi bila mendengar kata dikirim ke “Rumah sakit umum,” maka sudah dipastikan bahwa pada realitasnya para aktivis pergerakan itu “dibawa”, “diasingkan”, atau “disembuhkan” ke kamp Digoel. Selain kata “Rumah sakit umum”, ketika ada informasi bahwa aktivis “masuk rumah sakit,” maka sebenarnya ia dimasukkan ke dalam penjara (Shiraishi, 2015, 2023). Berita-berita mengenai penangkapan para aktivis pergerakan hingga 13.000 orang setelah pemberontakan tahun 1926-1927 dan pembuangan sekitar 1.300 orang ke Tanah Merah, Boven Digul banyak ditemukan di media massa. Tujuannya jelas, yaitu membentuk ketakutan di kalangan kaum pergerakan dan kamu pembangkang pemerintah lainnya

dengan menciptakan hantu-hantu penindasan, seperti hantu dunia Digul ini. Bagi mereka yang mau bekerjasama dengan pemerintah, maka mereka “hanya” dikirim ke Tanah merah, dan bagi yang menolak bekerja sama maka akan dibuang ke Tanah tinggi, suatu tempat yang lebih jauh, lebih tidak sehat dari Tanah merah (Shiraishi, 2023). Metafora-metafora ini seyogyanya menunjukkan bagaimana wacana ikut berperan dalam membangun ingatan atas kekuasaan suatu rezim. Rezim melakukan tindakan penindasan dengan mengkategorikan orang yang terlibat G30S dan yang dituduh terlibat sebagai orang-orang yang berpenyakit dan harus dimasukkan ke dalam instalasi rehabilitasi.³

Dalam dunia medis, rehabilitasi merujuk pada proses atau upaya yang bertujuan untuk membantu individu dengan penyakit serius atau memiliki cacat (disabilitas) agar dapat mencapai potensi maksimal dalam aspek fisik, psikologi dan sosial. Layanan rehabilitasi medis mencakup penyesuaian pola hidup seperti diet, aktivitas fisik dan olahraga, serta mencakup layanan khusus seperti perawatan pediatrik, manajemen nyeri dan bantuan dalam perawatan pribadi (Astari & Triana, 2018). Sedangkan instalasi rehabilitasi berkaitan dengan tempat hingga alat pelayanan untuk pemulihan kesehatan. Seperti halnya fungsi dari layanan rehabilitasi medis tersebut, rezim Orde Baru memberi sebutan Instalasi Rehabilitasi (Inrehab) untuk tempat pengasingan tahanan politik yang terkait (atau yang sengaja dikaitkan) dengan PKI. Inrehab kemudian berfungsi sebagai kamp, pemusatan kontrol negara hingga bentuk penindasan yang dirancang secara sistemik.

Penindasan yang dilakukan oleh rezim terhadap kelompok kemudian menyebar seperti penyakit merasuki pikiran serta tubuh sosial lainnya penyebaran penyakit medis melalui sebutan “bersih diri” dan “bersih lingkungan”. Dalam perspektif kesehatan, istilah “bersih diri” dan “bersih lingkungan” merujuk pada upaya untuk menjaga kebersihan pribadi dan lingkungan untuk mencegah ancaman terhadap kesehatan. Namun, dalam konteks epidemiologi penindasan era Orde Baru, istilah tersebut memiliki makna yang berbeda. “Bersih diri” digunakan untuk menggambarkan seseorang yang tidak terlibat dengan organisasi komunis, sementara “bersih lingkungan” tidak merujuk pada kebersihan lingkungan fisik, melainkan lingkungan sosial-politik, yaitu memastikan seseorang tidak memiliki keluarga ataupun berhubungan dengan pihak yang pernah terkait dengan PKI.

“Perburuan” yang berujung di Inrehab Buru dan Plantungan

Epidemiologi penindasan yang terjadi dimulai dari penangkapan orang-orang yang dianggap terlibat G30S, interogasi hingga pengasingan. Pengalaman memperlakukan penangkapan aktivis selainya para penentang negara pada masa kolonial. Sebagaimana pengasingan pada masa kolonial membangun kamp pengasingan di Tanah merah Boven Digul dibangun

³ Sebagaimana wacana mengenai kegilaan (*madness*) yang berubah dari waktu ke waktu seiring dengan kepentingan rezim penguasa. Semasa abad pertengahan di Eropa, wacana mengenai siapakah orang gila, apa saja kategori orang gila dan bagaimana penanganannya berubah sesuai dengan bagaimana kuasa wacana rezim. Kegilaan pada awal abad pertengahan adalah hal yang berhubungan dengan “orang-orang gila” yang dinyatakan secara medis. Namun pada masa abad pertengahan hingga masa awal Renaisans orang yang dikategorikan gila bisa mencakup “orang-orang gila secara moral”. Maka, siapa saja orang yang dianggap tidak bermoral, maka mereka akan dimasukkan ke dalam Rumah sakit *Hospita general* yang nampak menjadi pengurungan raksasa. Bahkan tidak mengherankan kemudian sebagian besar masyarakat pada masa itu dipastikan sempat mencicipi “pengurungan raksasa” tersebut meski hanya satu atau dua hari (Foucault, 2002).

oleh pemerintah kolonial dengan mengerahkan para tapol, begitu pula yang terjadi pada masa Orde Baru.

Para tapol yang dipindahkan baik ke Pulau Buru maupun Plantungan, sebelumnya mereka mengalami penahanan terlebih dahulu seperti di penjara bukit Duri (Jakarta), Wirogunan (Yogyakarta) maupun penjara Bulu (Semarang). Tidak hanya itu, bahkan beberapa tempat khusus “disulap” menjadi “ruang penjara” dan “ruang interogasi” seperti gedung Jefferson dan Benteng Vredeburg di Yogyakarta ([Endang, 20 July 2024](#)).

Saya dulu ditahannya di benteng Vredeberg, tahun 65 ya. Terus waktu diperiksa itu, diperiksanya di sini (Gedung Jefferson), semua (tahanan) dari kota itu diperiksa di sini. Kalau sudah diperiksa-nya di sini, itu, kalau sudah di periksa dikembalikan lagi ke tempat masing-masing, ada yang di Wirogunan, di Ngupasan, ada yang di Benteng. Saya diperiksa juga nggak banyak, dan kebetulan tidak diperiksa ee..fisik saya nggak, tapi ya pelecehan seksual sedikit, cuma ditanya aja, “Ibu mau menggulingkan pemerintah Soekarno yang sah ya..?”. “Nggak”, saya bilang begitu. Terus sudah, nggak ditanya lagi. Cuma ditanya, “Ibu Gerwani?”. “Bukan”, jawab saya. Nah, mau diperiksa semuanya toh, yang ditanya capnya. yang dicari katanya cap. Saya cuma ditanya begitu, terus pulang. Jadi nggak digebuk, atau di apa, nggak, kebetulan. Tapi teman-teman iya. Kan bareng-bareng... Kalau untuk pria, (pengalaman) suami saya dulu, dia ditendang sampai sobek, saya tanya “(dulu) diobati apa, mas?”. Kan di Wirogunan toh [ditahan]. “Ah, cuma dikasih kencur sedikit saja” [jawab suaminya], untuk obat kencurnya juga menghubungi teman yang bisa dihubungi untuk mengirim kiriman kencur. Dikasih kencur saja ([Endang, 20 July 2024](#)).

Selama penahanan, para tapol tidak dapat bertemu dengan keluarga dengan mudah. Ketika mereka mendapatkan kesempatan untuk bertemu, mereka harus menahannya. Kisah ini terungkap melalui pengalaman dr. Sumiyarsi Siwirini, satu-satunya dokter bagi 500 tahanan di Inrehab Plantungan. Sumiyarsi, yang pernah menjabat sebagai bendahara Himpunan Sarjana Indonesia (HIS) dan dianggap memiliki hubungan dengan PKI, terjerat dalam tuduhan serius. Pada saat penggeledahan kantor PKI tahun 1965, telah ditemukan dokumen dari sekretaris Komite Seksi (CS) PKI di Jakarta yang meminta Sumiyarsi menuliskan surat izin libur bagi anggota PKI yang akan mengikuti pelatihan Dwikora. Berdasarkan dokumen tersebut, ia dituduh sebagai dokter Gerwani yang diduga melakukan penyiksaan terhadap para jenderal di Lubang Buaya. Penangkapan ini memisahkan Sumiyarsi dari ketiga anaknya, sementara suaminya juga di tahan dan dipindahkan ke Pulau Buru. Sebelum dipindahkan ke Plantungan, pihak keluarga sempat mengunjunginya di tahanan untuk memberikan ucapan perpisahan. Meskipun bertemu dengan anak-anaknya, Sumiyarsi memilih untuk menahan diri agar tidak memeluk atau bercengkrama dengan mereka demi melindungi mereka dari bahaya stigma sosial.

Pertemuan penuh haru segera berlalu. Aku tidak memperlakukan anak pertamaku secara lebih istimewa dengan yang lain meskipun aku sangat ingin bercengkrama dan memeluk ciumnya melebihi yang lain. Aku tidak melakukan itu justru untuk melindunginya dari kemungkinan incaran pihak penguasa, kami tidak menghendaki hal itu akan merugikan hari depan anak-anakku di bawah rezim ini. Mungkin sekali suasana batin kami masing-masing mempunyai persamaannya. Tetapi betapa kontradiktifnya, aku sangat mencintai anak-anakku tetapi bersama itu justru aku

tidak mengakuinya di depan umum bahwa mereka anakku. Kami berusaha melindungi mereka dari kekejaman “rezim bersih lingkungan” yang mendiskriminasi manusia antara lain berdasar ideologi orang tuanya (Siwirini, 2010).

Penindasan bagi para tapol berlangsung mulai dari “perburuan” tanpa peradilan maupun surat perintah hingga berujung pada penangkapan dan penahanan di pulau Buru. Sebagai tempat instalasi rehabilitasi, Pulau Buru—selanjutnya disebut sebagai Inrehab Buru—dibangun oleh tangan kosong para tapol. Para tapol yang dikirim ke Inrehab Buru yang dikategorikan sebagai golongan B dan golongan C harus mencabuti alang-alang yang tinggi tanpa menggunakan alat bantu apapun (Toer, 2000). Dalam ingatan Pramoedya Ananta Toer, seorang pengarang dan tergabung dalam Lembaga kebudayaan Rakyat (Lekra), gambaran itu sebagai berikut :

Tapi juga pada pagi pertama itu kembali aku terkejut, kami diperintahkan membuka jalan. Tanpa alat! Karena memang belum ada jalan yang harus dibuka itu menerjang padang rumput dan rumput itu tinggi: alang-alang, rumput beruas yang lebih dua meter tinggi, rumput persegi tiga dengan sirip setajam silet sampai setinggi satu setengah meter. Semua dicabuti dengan tangan telanjang, selama hari-hari kerja. Dan tidak setiap orang punya topi. Dalam panas sengang yang lembab di tengah-tengah padang rumput, dengan hanya pohon kusu-kusu kurus di sana-sini. Rumput tak mungkin tercabut bersih, apalagi sampai ke akarnya. Yang pasti, telapak tangan dan jari-jari berdarah (Toer, 2000).

Pulau Buru merupakan satu wilayah di bagian Maluku Utara, di mana pemberangkatan para tapol merupakan upaya untuk menjauhkan mereka dari masyarakat. Seperti para penderita lepra yang diharuskan dijauhkan dari masyarakat, maka para tapol ini diberangkatkan ke Buru dengan tujuan yang sama: dijauhkan dari masyarakat karena “penyakit berat” yaitu “cacat ideologi”. Bahkan pembukaan pulau Buru untuk menjadi Inrehab ini dengan tujuan untuk menampung para penderita penyakit di dalam satu kamp konsentrasi agar para tapol tidak perlu kembali ke daerah awal masing-masing (Razif, 2004). Pusat inrehab Buru ini memiliki 23 unit penahanan dan ditinggali oleh sekitar 11.000 orang tapol (Razif, 2004).

Plantungan merupakan salah satu lokasi penahanan untuk tahanan politik perempuan yang dikategorikan sebagai tahanan politik golongan B, yaitu anggota PKI yang tidak terlibat langsung peristiwa G30S. Pada masa kolonial Belanda, tempat ini awalnya berfungsi sebagai rumah sakit bagi penderita lepra. Inrehab Plantungan dan Pulau Buru dikenal masyarakat sekitar sebagai momok yang menakutkan karena dianggap sebagai tempat pembuangan para penjahat dan sarang “penyakit ideologi”. Kondisi serupa juga terjadi di Inrehab yang berada di Pulau Nusa Kambangan, tahanan kriminal di sana mendapatkan perlakuan yang lebih baik dibandingkan tahanan politik. Tahanan politik sering kali menjadi korban diskriminasi dari pemerintah dan masyarakat, termasuk dalam akses layanan kesehatan. Walaupun fisik mereka sehat secara medis, jiwa mereka dianggap “sakit” karena menganut ideologi komunis. Hal ini tercermin dari pengawasan dan pengamanan ketat yang diterapkan setiap kali mereka keluar. Di tempat penahanan seperti

Plantungan dan Pulau Buru, para tahanan harus mengelola pengobatan mereka secara mandiri.



Gambar 1. Pemeriksaan Tahanan Politik PKI di Tangerang
Sumber: Perpustakaan Nasional No. 13347/PN/Foto/2008

Nama Plantungan berasal dari kata *lantung* atau *latung* yang dalam bahasa Jawa berarti tanah liat hitam. Sesuai dengan makna tersebut, Plantungan dikenal sebagai tempat yang merepresentasikan kehidupan yang kelam dan penuh kesulitan. Lokasi ini menjadi terkenal ketika pemerintah kolonial Belanda mendirikan rumah sakit untuk penderita lepra. Rumah sakit ini beroperasi mulai tahun 1870 hingga 1964 (Wachid, 2012). Pada tahun 1970, pemerintah memanfaatkan bekas rumah sakit ini sebagai tempat penahanan bagi tapol perempuan. Letaknya yang terpencil dan sulit diakses menjadi alasan utama pemilihan lokasi ini (Lestariningsih, 2011). Mengacu pada sejarahnya sebagai tempat isolasi bagi penderita lepra, pemindahan tapol perempuan kategori B ke Plantungan secara tidak langsung menciptakan citra bahwa mereka adalah “penderita lepra politik”

Dalam ingatan almarhumah ibu Sumarmiyati, perjalanan menuju Plantungan adalah perjalanan yang disertai dengan ingatan traumatis. Hal ini dikarenakan proses penangkapan serta interogasi yang tanpa dibawa ke meja peradilan, dipenuhi dengan kekerasan bahkan pelecehan seksual yang dilakukan aparat. Ia bahkan sempat mengalami persoalan kesehatan seksual dikarenakan tingkat stres yang sangat tinggi akibat proses interogasi yang sangat merendahkan harkat kemanusiaannya (Sumarmiyati, 14 April 2010). Ia menuturkan lebih lanjut, Plantungan adalah tempat untuk menyadarkan para perempuan yang dianggap rezim sudah kehilangan akal politiknya (Sumarmiyati, 14 April 2010).

Plantungan sebagai bekas Rumah sakit lepra pada masa kolonial, dibangun kembali pada masa Orde Baru dengan membangun citra yang sudah melekat pada Plantungan sebagai tempat pengobatan penyakit menular. Maka, orang-orang yang diasingkan ke Rumah sakit ini semakin “sah” dan kuat sebagai citra perempuan yang mengidap “lepra politik”, dan harus “direhabilitasi ideologinya” agar dapat “bersih diri” dan tidak menulari lingkungan sekitarnya ketika mereka sudah dibebaskan.

Plantungan yang semenjak lama sudah ditutup pengoperasiannya, dibuka kembali oleh Rezim Orde Baru dengan cara memanfaatkan tenaga-tenaga perempuan tapol ini. Pembukaan dan pembersihan areal rumah sakit ini dalam ingatan tapol perempuan sangat memberatkan dan menyusahkan seperti halnya pembangunan jalan Inrehab Buru. Salah satu tapol perempuan itu adalah Heryani Busono Wiwoho. Berikut penuturannya:

Sebulan kemudian kami dipindahkan ke bawah ke bekas kompleks Rumah sakit Lepra. Mulai hari itu, kegiatan kami adalah membersihkan alang-alang yang tingginya kurang lebih satu meter. Di sini terdapat banyak ular dan kalajengking. Berhubung tidak ada alat seperti pacul, arit atau parang, maka kami bekerja dengan menggunakan kedua belah tangan kami. Ternyata daun alang-alangnya tajam-tajam, sehingga tangan kami mulai berdarah-darah dan rasanya pedih sekali (Wiwoho, 2012).

Seperti halnya layanan rehabilitasi medik, tahanan politik penghuni inrehab Plantungan juga harus menyesuaikan gaya hidup mereka. Salah satu bentuk penyesuaian tersebut adalah pembatasan porsi makanan yang diterima. Akibatnya, banyak dari mereka yang mengalami penurunan berat badan hingga lebih dari 10 kg. Jagung grontol adalah salah satu menu yang mereka terima. Dalam tradisi Jawa, jagung grontol biasanya disajikan sebagai camilan berupa jagung kukus yang merekah dan diberi taburan kelapa parut namun jagung grontol untuk tapol PKI wujudnya jauh berbeda dari yang biasanya dijual di pasar. Jagungnya tidak manis dan keras.

Mobilitas para tahanan politik di Inrehab terhitung sangat tinggi dan mencakup banyak aktivitas. Kegiatan harian mereka berlangsung dari pukul 04.00 hingga 16.00, mencakup berbagai bidang seperti kesehatan, pertanian, peternakan, pembatikan, penjahitan dan kerajinan tangan (Lestariningsih, 2011). Dalam hal perawatan kesehatan pribadi, Inrehab Plantungan memang tidak memiliki dokter ataupun petugas kesehatan pemerintah resmi dari pemerintah yang bertugas di sana. Oleh karena itu, seluruh kegiatan pengobatan dan perawatan kesehatan sepenuhnya dikelola oleh tahanan sendiri.

Suasana represif hampir dirasakan tiap malam sebagaimana dituturkan oleh seorang ibu di Plantungan. Yang paling diingat adalah para perempuan harus dihitung setiap hari. Berikut penuturan Ibu Walbi :

Pernah di Plantungan itu mungkin teman-teman memperhatikan nggak ya waktu itu.. dingin sekali di pegunungan.. ada laporan dari masyarakat, ada dua orang pelarian. Malem, sekitar jam 12. Katanya ada pelarian dua orang. Disuruhlah kita keluar, sudah .. kalau nggak ketemu orangnya, mesti kita yang dihukum. Nah. Terus itu. Kita disuruh gini. Ini tentaranya sudah membawa bedil kita dihitung. Ternyata kurang satu, waduh siapa kurang satu? Duh siapa.. semua pintu dibuka, di situ kan ada WC. Ternyata ada satu WC-nya itu tertutup.. ada satu orang diam di situ, dia stress, akan ada hukuman kalau nggak ketemu. Ternyata orang kampung situ. Pakaiannya sama kaya kita, pakai daster, pakai jaket, kudung karena dingin.. siapa yang melarikan diri. Berani-beraninya. Ternyata tidak ada. Kondisi sampai sudah *kepujuh... puyung*. [Kejadiannya] malam, sudah kita kedinginan. [Sementara itu] dari messnya tentara-tentara itu, menyetel kaset, keras sekali lagunya. Saya masih ingat itu, lagu Waljinah [judulnya] "Ayo ngguyu," padahal saya dalam keadaan tegang waktu itu. Sampai sekarang itu, rasanya saya teringat terus [kejadian ini] kalau ada

lagu itu [hampir menangis]. Waktu di Plantungan itu yang paling teringat (Walbi Rahayu, 20 July 2024).

Pengalaman tertekan Ibu Walbi dengan ancaman dan di bawah todongan senjata tentara ini serupa dengan pengalaman dr. Sumiyarsi yang merasa tertekan secara psikis karena menahan kerinduan terhadap keluarganya. Sebagian besar tahanan politik yang diduga memiliki keterkaitan dengan Partai Komunis Indonesia berupaya menyembunyikan identitas keluarganya. Hubungan antara suami dan istri seringkali terputus, orang tua terpaksa berpisah dengan anak-anaknya, dan bahkan beberapa tahanan tidak lagi diakui oleh keluarga dan lingkungan sosial mereka. Mereka yang dianggap memiliki ideologi komunis diperlakukan seperti individu “sakit” yang harus dihindari. Situasi ini merupakan dampak dari kebijakan “bersih diri” dan “bersih lingkungan” yang diberlakukan oleh pemerintah Orde Baru.

Pemerintah berupaya melakukan “bersih diri” terhadap tahanan politik melalui program santiaji, yang berisi arahan dan pembinaan. Di Inrehab Plantungan, kegiatan ini rutin diadakan setiap hari Sabtu dengan materi mencakup Garis Besar Haluan Negara (GBHN), Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dan topik lainnya (Bustam, 2008; Bustam, 2022). Pada waktu tertentu, diadakan ujian untuk menguji pemahaman terhadap materi yang disampaikan. Bagi tapol yang tidak bisa membaca dan menulis, ujian dilakukan secara lisan. Santiaji juga diberikan saat para rohaniawan mengunjungi inrehab tersebut. Ada aspek menarik terkait kehidupan keagamaan para tahanan politik. Meskipun dianggap ateis dan tidak beragama, selama penahanan, beberapa dari tapol ada yang melakukan konversi agama. Salah satunya adalah Mia Bustam, mantan anggota Lekra sekaligus mantan istri dari pelukis Sudjojono. Selain Santiaji, dogma agama juga secara rutin diajarkan kepada para tahanan politik oleh karena mereka dianggap “kotor”. Pemberian arahan santiaji dan doktrin agama ini dipandang sebagai bagian dari upaya “bersih diri”.

Tindakan “pembersihan” dan “pengamanan” tidak hanya menasar individu yang dianggap sebagai penderita lepra politik, tetapi juga ditujukan kepada keluarga tahanan politik. Situasi ini dialami oleh istri Hardi, Ibu Mumun, dan Ibu Eti yang suaminya adalah anggota PKI dan dikirim ke Pulau Buru. Keluarga yang tetap tinggal di rumah menghadapi pengucilan sosial dan seringkali menjadi korban perlakuan sewenang-wenang dari aparat. Seperti yang pernah diceritakan oleh salah satu narasumber, beberapa aparat bertindak sesuka hati dengan dalih meminta untuk “ pijat” atau “kerok”. Dalam budaya Jawa, pijat dan kerok biasanya dilakukan sebagai metode tradisional untuk memulihkan kesehatan. Namun, pada prakteknya permintaan ini seringkali menjadi kedok untuk memaksa para perempuan dari keluarga tapol melayani hasrat seksual aparat, dengan alasan “mengamankan” keluarga para tapol (Mariana, 2015).

Dusta Eufemisme dan Reproduksi Ingatan Anti-Komunis

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, eufemisme adalah bentuk penghalusan bahasa untuk menggantikan ungkapan yang dianggap kasar tanpa mengubah maknanya. Namun, istilah-istilah yang digunakan oleh pemerintah Orde Baru, seperti yang telah diuraikan sebelumnya, menunjukkan adanya pergeseran makna yang signifikan. Lebih lanjut menurut

Prof. Dr. Daulat Tampubolon dalam sebuah artikel mengungkapkan bahwa Orde Baru memanfaatkan bahasa untuk menindas maknanya, memonopoli arti semantik dan melakukan apa yang disebut sebagai dusta eufemisme ([Tampubolon, 1998](#)).

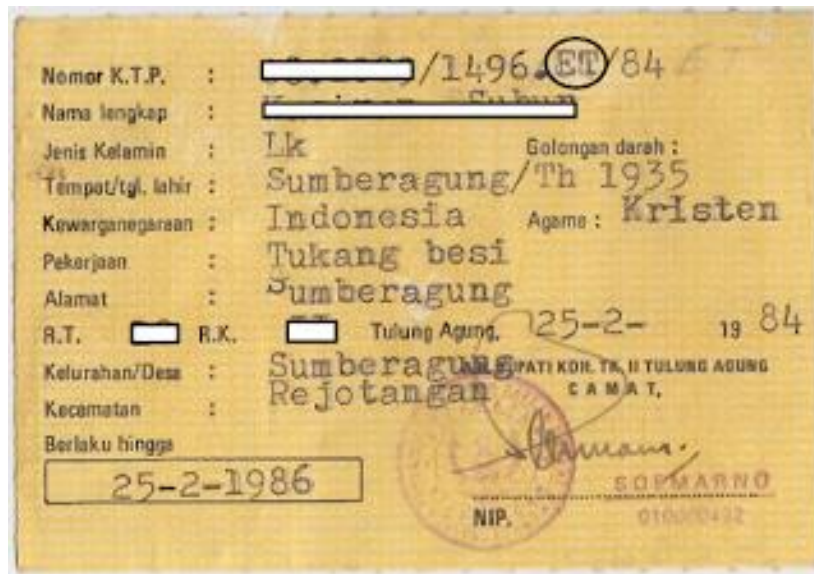
Meskipun semua tahanan Inrehab di Indonesia telah dibebaskan sejak tahun 1979, reproduksi dusta eufemisme tetap berlangsung. Pembebasan yang diberikan hanya mencakup aspek fisik, sementara para mantan tahanan masih harus menghadapi stigma sosial dari masyarakat. Salah satu contohnya adalah pengalaman Ibu Walbi, yang ditahan selama 14 tahun di Plantungan tanpa dakwaan yang jelas maupun proses peradilan.

Saya keluar dari Plantungan itu, saya berpenampilan, lain daripada yang lain, saya tidak bersalah.. yang dulunya tidak bisa menerima saya .. saya main ke situ saja nggak berani, ada tetangga saya, ta main kesana, nggak punya lieran apa-apa. Sudah 14 tahun.. ada orang yang titip saya, orang-orang tapi tidak berani.. saya mau menunjukkan bahwa saya tidak bersalah. Walaupun mereka mencemooh saya, saya berupaya betul. Saya langsung di aktif di PKK. Sewaktu itu saya nggak peduli, dan waktu itu dari ... masih ada sedikit apa.. wibawa. Saya harus berbuat baik. Lama-lama juga akhirnya juga tetangga-tetangga tahu siapa saya. Waktu itu banyak yang nggak terima.. ada yang mengatakan nggak bisa masuk koperasi. Nggak boleh masuk, nggak bisa pinjam uang karena nggak punya ktp. Malah berat di luar ya...tapi saya tetap semangat, saya menunjukkan (bahwa) saya tidak bersalah ([Walbi Rahayu, 20 July 2024](#)).

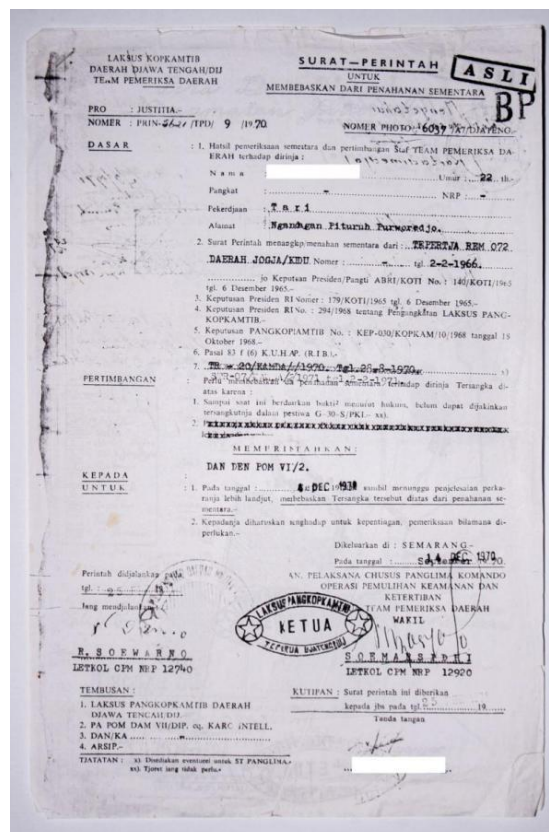
Ia merasakan bahwa kehidupan yang berat selama penahanan di instalasi rehabilitasi Plantungan, tidak seberapa dibandingkan dengan penjara dalam kehidupan sosial. Epidemiologi penindasan dirasakan secara nyata dan bertahun-tahun dalam diri Ibu Walbi dan para korban lainnya seperti penyakit yang tersebar cepat, merasuki badan dan pikiran sosial, dihindangi oleh masyarakat. Kebebasan dari penindasan tersebut mulai berhenti saat Abdurrahman Wahid terpilih menjadi presiden. Pada era sebelum Abdurrahman Wahid menjadi presiden, para eks tapol memiliki tanda E.T (eks tapol) di KTP-nya, dan masih harus menjalani wajib lapor ke Kodim setempat selama bertahun-tahun, termasuk anggota keluarga mereka yang terkena aturan “bersih lingkungan” meski sudah memasuki alam reformasi.

Aturan mengenai “bersih diri” dan “bersih lingkungan” secara resmi dilegalkan melalui peraturan yang diterbitkan oleh Departemen Dalam Negeri pada tahun 1981. Dalam aturan ini, individu yang dianggap tidak memenuhi kriteria “bersih diri” atau “bersih lingkungan” dilarang bekerja sebagai PNS, anggota TNI/Polri, guru atau profesi yang dinilai memiliki mempengaruhi terhadap masyarakat. Keputusan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden RI Nomor 28 Tahun 1977 tentang perlakuan terhadap mereka yang terlibat G.30S/PKI golongan C. Pegawai Pemerintah (PNS dan TNI/Polri) yang diketahui pernah bergabung dengan partai atau organisasi yang berafiliasi dengan PKI langsung diberhentikan tanpa status jelas, bahkan beberapa diantaranya dipenjara tanpa melalui proses peradilan. Larangan ini juga berlaku bagi anggota keluarga mereka yang dilarang menjadi pegawai pemerintah maupun bekerja di BUMN ([Bapak Edi, 14 April 2010](#); [Budi Susanto, 2007](#)). Peluang untuk bekerja di sektor pemerintah maupun bidang lain menjadi sangat terbatas bagi mereka. Setiap calon pegawai di posisi tersebut harus melalui proses

Litsus (Penelitian Khusus) untuk memastikan bahwa mereka memenuhi syarat sebagai individu yang bersih diri dan bersih lingkungan. Selain itu, pada dokumen KTP, para mantan tahanan politik diberi tanda atau kode khusus berita ET (Eks Tapol).



Gambar 4. Kartu tanda penduduk ex-tapol PKI memiliki tanda ET (eks tapol)
Sumber: Dokumen keluarga Tan Tik Soe
(Sumber: [Indozone News](#), 2021)



Gambar 5. Surat Perintah Pembebasan Sementara Ibu Melati (Pseudonym)
(Sumber: Arsip pribadi ibu Melati (pseudonym), penyintas dari Desa Ngandagan, Purworejo)

Dampak dari pemberlakuan kebijakan “bersih lingkungan” juga dirasakan di kalangan elite pemerintahan Indonesia. Ketegangan muncul pada tahun 1988 ketika dua nama kandidat wakil presiden mencuat, yaitu Jenderal L.B. Moerdani dari kalangan ABRI dan Sudharmono sebagai wakil Golkar. Pada akhirnya Sudharmono terpilih melalui mekanisme di MPR. Namun, setelah itu, Moerdani mengungkapkan bahwa Sudharmono memiliki masa lalu yang dianggap tidak “bersih lingkungan”. Kampanye untuk mendiskreditkan Sudharmono memicu suatu gelombang pembersihan oleh kelompok anti-komunis dengan mengusung “bersih diri” dan “bersih lingkungan” yang diarahkan kepada individu-individu di dalam pemerintahan serta media yang diduga mempunyai simpati atau memiliki hubungan dengan kelompok komunis di masa lalu (Mcgregor, 2008).

Pada bulan April 1990, ideologi anti-komunis kembali diperkuat melalui keputusan Presiden Suharto yang mendukung pembaruan gerakan anti-komunis dengan penggunaan istilah “keterpengaruhan”. Kategori ancaman “komunis” ini mencakup tindakan, ucapan, tulisan atau sikap yang dianggap menyerupai atau mendukung strategi PKI maupun kelompok “kiri ekstrim” (Mcgregor, 2008). Selain itu, istilah “bersih lingkungan” juga diimplementasikan untuk potensi konflik yang mulai terlihat sejak 1998. Kebijakan ini menargetkan anak-anak dan keluarga mantan tahanan politik hingga tiga generasi. Sasaran tersebut mencakup hubungan vertikal seperti saudara kandung, pasangan hidup, mertua, menantu, teman dekat dan hubungan horizontal seperti ibu, ayah, anak dan cucu (Hersri S, 2003).

Pengaruh peliyanan ini dirasakan berdampak panjang bagi keluarga korban peristiwa 65. Sebagaimana ingatan salah satu anak korban peristiwa 65, Melati (*pseudonym*) atas kehidupan yang dialami keluarganya. Kehidupan yang mereka alami, sejarah hidup mereka kemudian, sangat dipengaruhi dari kisah perjalanan para orang tua mereka yang pernah diasingkan ke Inrehab.

Dua adik laki-lakiku kini tidak diketahui keberadaannya. Mereka stres tidak mendapatkan pekerjaan yang diinginkan karena dulu ibu menjadi aktivis Gerwani, dan sekarang mereka keluyuran entah ke mana. Dulu salah satu adik laki-laki tinggal di rumahku, tetapi lama-lama aku tidak kuat menanggungnya. Seperti harapan banyak orang, ia melamar kerja di salah satu instansi sesudah lulus dari STM di Yogyakarta. Ketika dites masuk, ketahuanlah bahwa ia keluarga tapol. Semua orang tahu bagaimana akibatnya. Tetapi, adikku tidak bisa menerima kenyataan itu. Ia tidak diterima kerja, stres dan gila. Mulai saat itulah ia merasa ibu tidak sayang pada kami. Katanya, “Gara-gara ibu, aku begini!”. Saat ibu keluar dari penjara (Plantungan, *pen*), seringkali adikku memaki-maki ibu, mengomeli ibu bahkan menyinggung-nyinggung ibu karena keterlibatannya di masalah politik. Kadang, kalau sedang tidak sehat, ibu sering ditendangi (Saleh et al., 2003).

Reproduksi ingatan menggunakan terminologi kesehatan untuk meliyankan komunis sangat terasa kental bahkan setelah Orde Baru runtuh. Salah satu buktinya terlihat pada tahun 2000, ketika ada upaya ekskavasi kuburan massal korban peristiwa 1965/1966. Tim dari Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 (YPKP 65/66) menghadapi penolakan dari masyarakat sekitar hutan Wonosobo (Erdianto, 2016; Roosa, 2008). Meski

telah terjadi lebih dari lima dekade sejak pembubaran PKI, propaganda anti-komunis masih terus berlanjut. Slogan seperti “awas bahaya laten komunis” masih sering terdengar dan disampaikan kepada publik.

KESIMPULAN

Penggunaan metafora kesehatan dalam kampanye anti-komunis mengandung lapisan makna yang kompleks dan sering kali menyesatkan. Istilah seperti “lepra politik”, “bersih diri”, “bersih lingkungan”, “instalasi rehabilitasi”, serta tindakan seperti “dipijat” atau “dikerok” adalah contoh terminologi yang dipinjam dari dunia medis untuk menggambarkan perlakuan terhadap tahanan politik. Metafora ini bukan hanya menysar individu yang terlibat dalam komunisme, akan tetapi juga keluarga mereka yang ikut terbebani oleh stigma serupa. Meskipun seluruh tahanan politik telah dibebaskan, stigma tersebut tidak lantas menghilang. Negara terus mereproduksi label ini, menciptakan gambaran bahwa mereka yang terlibat adalah “pesakitan” yang harus dijauhkan dari masyarakat.

Dengan meminjam konsep Frantz Fanon, istilah “epidemiologi penindasan” menggambarkan bagaimana penggunaan metafora kesehatan ini membentuk suatu jaringan ingatan kolektif yang mendalam di masyarakat Indonesia. Ingatan ini terus dipelihara sebagai suatu “memori kolektif” yang terus waspada terhadap “bahaya laten komunis”. Meskipun pada kenyataannya para tapol sudah dibebaskan dari penjara fisik, label tersebut tetap menjadi beban sosial yang terus diperbaharui dan dipertahankan melalui berbagai bentuk kebijakan, narasi dan simbol yang mempertahankan ketakutan terhadap ideologi komunis sebagai ancaman yang tak pernah benar-benar hilang. Stigma itu menjadi alat kontrol sosial yang memastikan bahwa ideologi yang dianggap menyimpang tidak akan kembali merebak, meski dalam kenyataannya, para tapol tersebut telah dinyatakan “sehat” setelah keluar dari “instalasi rehabilitasi”.

DAFTAR RUJUKAN

- Anderson, B. R. (2000). *Kuasa kata: Jelajah budaya-budaya politik di Indonesia*. Mata Bangsa.
- Astari, R., & Triana, W. (2018). *Kamus kesehatan Indonesia—Arab* (F. Fatmawati, Ed.). Trussmedia Grafika.
- Bapak Edi. (14 April 2010). *Wawancara dengan Bapak Edi*.
- Budi Susanto, A. (Ed.). (2007). *Sisi senyap politik bising*. Penerbit Kanisius : Lembaga Studi Realino.
- Bustam, M. (2008). *Dari kamp ke kamp: Cerita seorang perempuan* (Cet. 1). Kerja sama Spasi, VHR Book, dan Institut Studi Arus Informasi : Distributor, Buku Kita.
- Bustam, M. (2022). *Kelindan asa dan kenyataan: Memoar ketiga Mia Bustam* (Bandung). Ultimus.
- Cribb, R. B. (2001). How many deaths?: Problems in the statistics of massacre in Indonesia (1965-1966) and East Timor (1975-1980). In I. Wessel & G. Wimhöfer (Eds.), *Violence in Indonesia*. Abera-Verl. Meyer.
- Endang. (20 Juli 2024). *Wawancara dengan Endang*.

- Erdianto, K. C. (2016, April 26). *YPKP 1965 sebut ada puluhan hingga ratusan kuburan massal tragedi 1965 di Jawa* Halaman all. KOMPAS.com. <https://nasional.kompas.com/read/xml/2016/04/26/13230101/YPKP.1965.Sebut.Ada.Puluhan.hingga.Ratusan.Kuburan.Massal.Tragedi.1965.di.Jawa>
- Fanon, F. (2008). *Black skin, white masks*. Pluto Press.
- Fanon, F. (2016). *Kolonialisme, rasisme, dan psikologi kulit hitam*. Jalan Sutera.
- Foucault, M. (2002). *Kegilaan dan peradaban, madness and civilization* (Y. Santoso, Trans.). Ikon Teralitera.
- Hersri S. (2003). *Kamus Gestok* (Cet. 1). Galang Press.
- Indozone News. (2021, September 29). *Mengenal KTP berlabel "ET" untuk Eks Tapol Orde Baru, pemiliknya sulit untuk bepergian*. Indozone News. <https://news.indozone.id/news/911562029/mengenal-ktp-berlabel-et-untuk-eks-tapol-orde-baru-pemiliknya-sulit-untuk-bepergian>
- Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi sejarah*. Tiara Wacana Yogya.
- Kuntowijoyo, Darban, A. A., Setiawati, N. A., Effendhie, M., & Budiyanto. (2023). *Perubahan sosial di pedesaan sejarah lisan Surakarta 1930-1960*. STPN Press.
- Lestariningsih, A. D. (2011). *Gerwani: Kisah tapol wanita di Kamp Plantungan*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mariana, A. (2015). *Perbudakan seksual: Perbandingan antara masa fasisme Jepang dan neofasisme Orde Baru* (Cetakan pertama). Marjin Kiri.
- Mcgregor, K. E. (2008). *Ketika sejarah berseragam: Membongkar ideologi militer dalam menyusun sejarah Indonesia = History in uniform: Military ideology and the construction of Indonesia* (Yogyakarta). Syarikat.
- Nandito, P., & Fajri, D. A. (2024, October 23). *Baru dilantik, 2 Menteri dan 1 Utusan Khusus Presiden Prabowo jadi sorotan publik*. Tempo. <https://www.tempo.co/politik/baru-dilantik-2-menteri-dan-1-utusan-khusus-presiden-prabowo-jadi-sorotan-publik-1096308>
- Nugraheny, D. E., & Rastika, I. (2023, January 11). *Jokowi akui 12 pelanggaran HAM berat masa lalu, ini daftarnya*. KOMPAS.com. <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/11/11074071/jokowi-akui-12-pelanggaran-ham-berat-masa-lalu-ini-daftarnya>
- Razif. (2004). Romusha dan pembangunan: Sumbangan tahanan politik untuk Rezim Suharto. In J. Roosa, A. Ratih, & H. Farid (Eds.), *Tahun yang tak pernah berakhir: Memahami pengalaman korban 65: Esai-esai sejarah lisan* (Cet. 1). Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) bekerja sama dengan Tim Relawan Untuk Kemanusiaan [dan] Institut Sejarah Sosial Indonesia.
- Roosa, J. (2008). *Dalih pembunuhan massal: Gerakan 30 September dan kudeta Suharto = Pretext for Mass Murder: The September 30th movement and Suharto's coup d'Etat in Indonesia*. (Jakarta). Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI).
- Roosa, J., Ratih, A., & Farid, H. (Eds.). (2004). *Tahun yang tak pernah berakhir: Memahami pengalaman korban 65: esai-esai sejarah lisan* (Cet. 1). Lembaga Studi dan

- Advokasi Masyarakat (ELSAM) bekerja sama dengan Tim Relawan Untuk Kemanusiaan [dan] Institut Sejarah Sosial Indonesia.
- Said, E. W. (2010). *Orientalisme: Menggugat hegemoni barat dan mendudukkan timur sebagai subjek*. Pustaka Pelajar.
- Saleh, A., Billah, M. M., Yayasan Penguatan Partisipasi Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia, & Hidup Baru (Eds.). (2003). *Usaha untuk tetap mengenang: Kisah-kisah anak-anak korban peristiwa '65* (Cet. 1). Yappika.
- Shiraishi, T. (2015). *Hantu Digoel; Politik pengamanan politik Zaman Kolonial*. Lkis Pelangi Aksara.
- Shiraishi, T. (2023). *Dunia hantu Digul: Pemolisian sebagai strategi politik di Indonesia Masa Kolonial, 1926-1941*. Insist Press.
- Simbolon, P. T. (2006). *Menjadi Indonesia*. Penerbit Buku Kompas.
- Siwirini, S. (2010). *Plantungan: Pembuangan tapol perempuan*. Pusat Sejarah dan Etika Politik (Pusdep), Universitas Sanata Dharma.
- Soekarno. (1964). *Dibawah bendera revolusi*. Panitya Penerbit Dibawah Bendera Revolusi.
- Sumarmiyati. (14 April 2010). *Wawancara dengan Sumarmiyati*.
- Tampubolon, D. (1998, October 28). Bahasa Orba, komponen terbesar kebangkrutan bangsa Indonesia. *Kompas*.
- Thompson, P. (2012). *Suara dari masa silam: Teori dan metode sejarah lisan*. Ombak.
- Toer, P. A. (2000). *Nyanyi sunyi seorang bisu I* (Yogyakarta). Hasta Mitra.
- Wachid, H. (2012). *Pengaruh keberadaan rumah sakit lepra Plantungan Kendal terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya (1958-1964)*. [Other, Universitas Negeri Semarang].
- Walbi Rahayu. (20 Juli 2024). *Wawancara dengan Walbi Rahayu*.
- Wiwoho, H. B. (2012). *Mengembara dalam prahara: Dari wirogunan sampai plantungan*. Pustaka Binatama.